

ABSTRACT

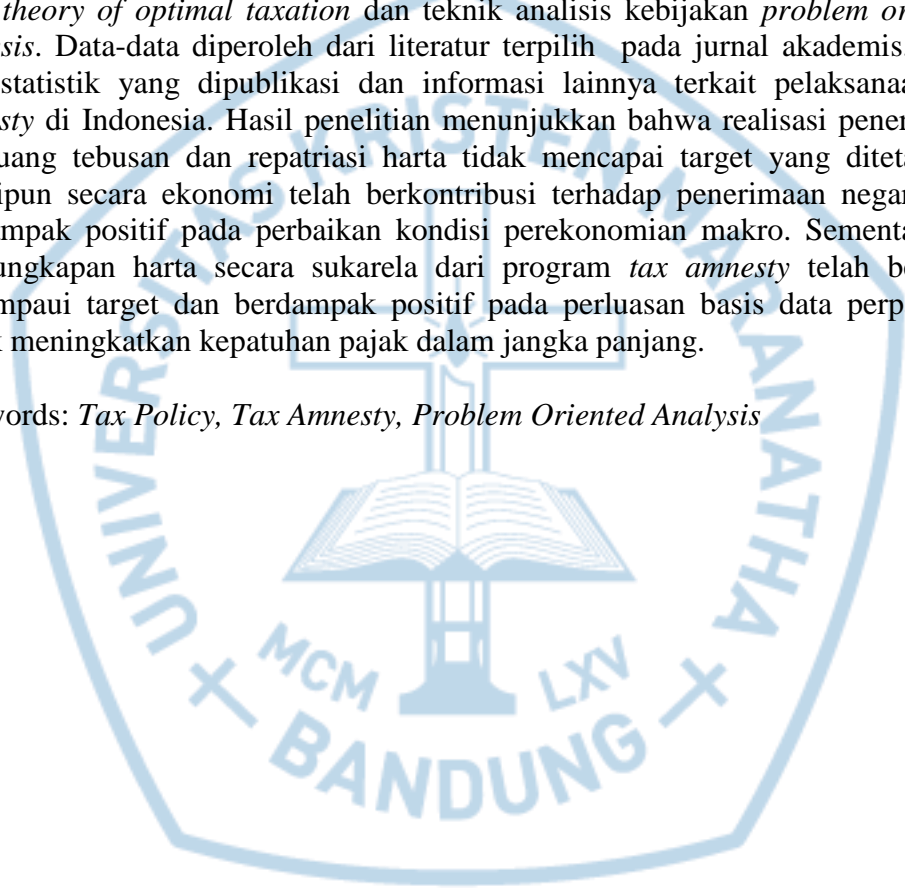
Global economic slowdown, world commodity prices decline, underground economy, offshore capital escapes and low tax compliance levels have affected the country's ability to collect tax revenues. This condition is reflected in the realization of tax revenues that tends to continue to decrease by a percentage (shortfall). This research tries to provide relevant information about the implementation of the tax amnesty implemented in Indonesia in 2016 in order to address the problems referred to in reference to the theory of optimal taxation and the policy analysis techniques Problem oriented analysis. Data obtained from selected literature in academic journals, published statistical data and other information regarding the implementation of tax amnesty in Indonesia. The results showed that the realization of tax declarations of on and offshore funds and the repatriation of the asset did not reach the stipulated target, even though economically has contributed to the state acceptance and positive impact on the improvement of the condition macro economy. Meanwhile, the voluntary disclosure of the tax amnesty program has been successfully surpassed by the target and has a positive impact on the broadening of the taxation database to increase tax compliance over the long term.

Keywords: *Tax Policy, Tax Amnesty, Problem Oriented Analysis*

ABSTRAK

Perlambatan ekonomi secara global, penurunan harga komoditas dunia, kegiatan *underground economy*, pelarian modal ke luar negeri dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah telah mempengaruhi kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Kondisi ini tercermin pada realisasi penerimaan pajak yang cenderung terus mengalami penurunan secara persentase terhadap target pencapaiannya (*shortfall*). Penelitian ini mencoba memberikan informasi yang relevan tentang pelaksanaan *tax amnesty* yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016 dalam rangka mengatasi permasalahan dimaksud dengan mengacu pada *theory of optimal taxation* dan teknik analisis kebijakan *problem oriented analysis*. Data-data diperoleh dari literatur terpilih pada jurnal akademis, data-data statistik yang dipublikasi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dari uang tebusan dan repatriasi harta tidak mencapai target yang ditetapkan, sekalipun secara ekonomi telah berkontribusi terhadap penerimaan negara dan berdampak positif pada perbaikan kondisi perekonomian makro. Sementara itu pengungkapan harta secara sukarela dari program *tax amnesty* telah berhasil melampaui target dan berdampak positif pada perluasan basis data perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Keywords: *Tax Policy, Tax Amnesty, Problem Oriented Analysis*



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN	16
2.1. Kajian Pustaka	16
2.1.1. Kebijakan	16
2.1.2. Kebijakan Publik (<i>public policy</i>)	18
2.1.3. Rasionalitas Kebijakan	19
2.1.4. Dalil Kemustahilan Arrow	19
2.2. Kebijakan Pajak (<i>Tax Policy</i>)	20
2.2.1. Teori Pemajakan Optimal	22
2.2.2. Struktur Pajak (<i>Tax Structure</i>)	28
2.2.3. Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi	29
2.2.4. Sistem Pemajakan	30
2.3. Pengampunan Pajak (<i>tax amnesty</i>)	36
2.3.1. Maksud dan tujuan <i>tax amnesty</i>	38
2.3.2. Pelaksanaan <i>tax amnesty</i> di Indonesia	40
2.4. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	45
2.5. Rerangka Pemikiran	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1. Obyek Penelitian	51
3.2. Metode Penelitian	51
3.2.1. Metode penelitian yang digunakan	52
3.2.2. Teknik pengumpulan data	53
3.2.3 Teknik analisis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
4.1. Kerangka konseptual <i>tax amnesty</i>	64
4.1.1. Tax amnesty sebagai pilihan kebijakan publik	64
4.1.2. Faktor penguangkit pelaksanaan <i>tax amnesty</i>	66
4.1.3. Rumusan <i>tax amnesty</i>	68
4.1.4. Jenis tax amnesty	69
4.1.5. Biaya dan manfaat <i>tax amnesty</i>	71
4.2. Pelaksanaan <i>tax amnesty</i> tahun 2016 di Indonesia	72
4.2.1. Pertimbangan kebijakan (Definisi)	72
4.2.2. Prediksi kebijakan (Prediksi)	75
4.2.3. Rekomendasi kebijakan (Preskripsi)	76
4.2.4. Pelaksanaan kebijakan <i>tax amnesty</i> (Deskripsi)	83
4.2.5. Penilaian kebijakan <i>tax amnesty</i> (Evaluasi)	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	106
5.1. Simpulan	106
5.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

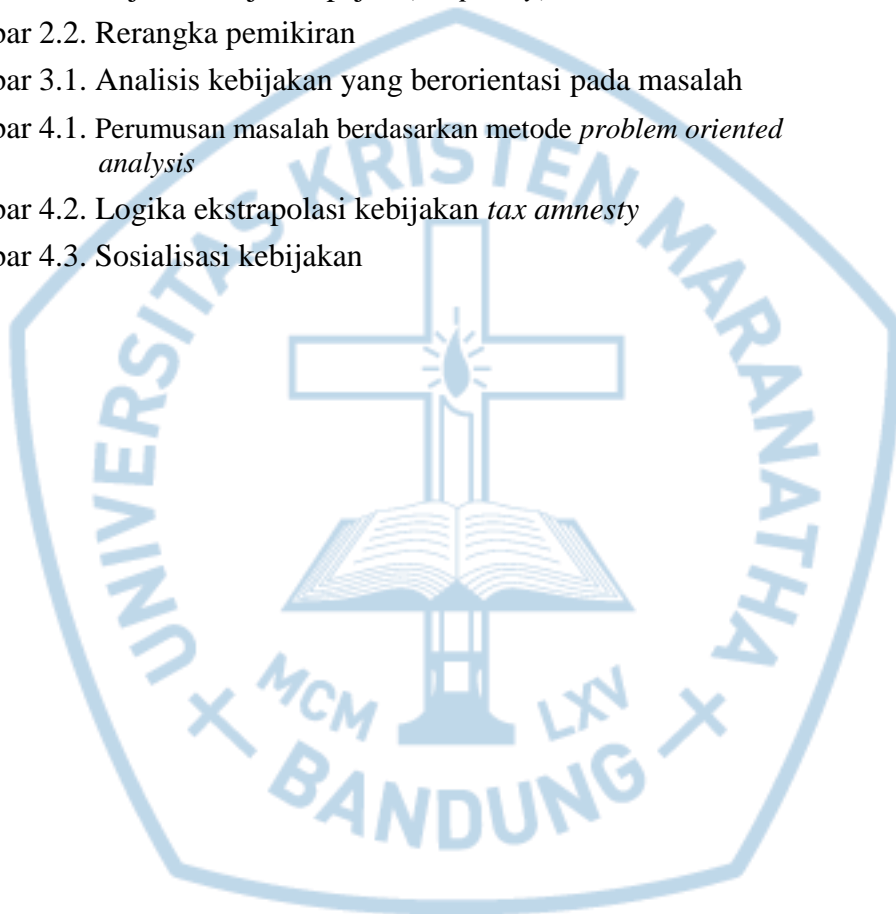
Tabel 1.1. Tren pertumbuhan ekonomi global (dalam %)	3
Tabel 1.2. Perbandingan realisasi penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan pajak, PDB, tax ratio, dan tax bouyancy	5
Tabel 1.3. Potensi perluasan basis pemajakan dari kegiatan ekonomi “bawah tanah” (<i>underground economy/shadow economy</i>) pada beberapa negara,2013	6
Tabel 1.4. Indeks kerahasiaan keuangan (<i>financial secrecy indeks</i>) 2015	7
Tabel 1.5. Daftar negara dengan arus keuangan keluar yang mencurigakan (illicit financial outflows (IFF), 2004 – 2013 dalam miliar dollar AS)	9
Tabel 1.6. Daftar negara <i>tax havens</i> berdasarkan letak geografisnya	10
Tabel 1.7. APBN 2010 – 2015 (triliun rupiah)	12
Tabel 2.1. Kelebihan dan kekurangan sistem pajak <i>teritorial</i>	32
Tabel 2.2. Kelebihan dan kekurangan sistem pajak <i>worldwide</i>	33
Tabel 2.3. Obyek pengampunan dan tarif tebusan (program pengampunan pajak tahun 1964)	40
Tabel 2.4. Obyek pengampunan dan tarif tebusan (program pengampunan pajak tahun 1984)	42
Tabel 2.5. Obyek pengampunan dan tarif tebusan (program pengampunan pajak tahun 2016)	44
Tabel 2.6. Penelitian terdahulu	45
Tabel 4.1. Rancangan umum kebijakan <i>tax amnesty</i>	69
Tabel 4.2. Target Capaian Program <i>Tax Amnesty</i> 2016	86
Tabel 4.3. Jenis instrumen investasi	93
Tabel 4.4. Hasil <i>Tax Amnesty</i> berdasarkan partisipasi Wajib Pajak	96
Tabel 4.5. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2016	96
Tabel 4.6. Target dan Realisasi Program <i>Tax Amnesty</i>	97
Tabel 4.7. Dampak Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak Terhadap Pasar Keuangan	98
Tabel 4.8. Rasio Belanja Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan (dalam triliun rupiah)	102

Tabel 4.9. Rincian Alokasi Pegawai dan Anggaran Dalam Program <i>Tax Amnesty</i> 2016	102
Tabel 4.10 Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti Program <i>Tax Amnesty</i> (ribuan)	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rencana dan realisasi penerimaan pajak (triliun rupiah)	2
Gambar 1.2. Tren Penerimaan sumber daya alam (triliun rupiah)	4
Gambar 1.3. Tren pembiayaan dan defisit anggaran terhadap PDB	13
Gambar 2.1. Tujuan kebijakan pajak (<i>tax policy</i>)	21
Gambar 2.2. Rerangka pemikiran	50
Gambar 3.1. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah	56
Gambar 4.1. Perumusan masalah berdasarkan metode <i>problem oriented analysis</i>	74
Gambar 4.2. Logika ekstrapolasi kebijakan <i>tax amnesty</i>	75
Gambar 4.3. Sosialisasi kebijakan	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pokok-pokok Permohonan Uji Materil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak	114
Lampiran 2. Pokok-pokok tanggapan pemerintah atas permohonan Uji Mate-riil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampu-nan Pajak	115
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Mendalam	119
Lampiran 4. Transkrip Lapangan	120

